

BAB V

KESIMPULAN

Keanggotaan Indonesia Menjadi Anggota IMO sejak tahun 1961 hingga saat ini tahun 2019 terus menjadi hal yang penting untuk eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan hal ini tidak bisa di hindarkan karna hampir 70% wilayah Indonesia adalah Laut, sehingga Kemaritiman menjadi salah satu tolak ukur Kedaulatan, Keamanan dan Perekonomian Indonesia walaupun Investasi cenderung lebih besar porsinya di bidang Infrastruktur yang berbasis di darat. Sehingga IMO menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia untuk memperoleh Kepentingan Nasional yang ingin dicapai, hal ini terbukti dengan menjadi Anggota Dewan di Komisi C Indonesia menjadikan ini sebagai prestasi yang harus di apresiasi karna memperebutkan 20 kursi di Komisi C. Akan tetapi keberadaan ini belum menjadi akhir perjuangan karna bagaimana pun Indonesia harus bisa terus eksis di dunia Internasional dan di masa depan bisa menjadi Komisi A dan salah satu yang terpenting bisa menjadi Sekretariat di IMO sebagai bukti bahwa Indonesia ialah Negara Poros Maritim Dunia.

Akan tetapi di lain sisi Indonesia belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir di seluruh Nusantara, dalam membangun poros maritim dunia, Indonesia harus menjadikan lima pilar utama sebagai pijakannya. Kelimanya, adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia; menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; dan memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Kemudian, pilar keempat yang menjadi pijakan, adalah penerapan diplomasi maritim melalui usulan

peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan. Untuk terakhir atau kelima, yaitu membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan maritim.

Sehingga melalui lima pilar poros maritim yang menjadi kebijakan Nasional Presiden Joko Widodo hendaknya di barengi dengan regulasi payung hukum yang mengikat dan penyederhanaan birokrasi di bidang kemaritiman sehingga kejadian seperti saat ini yang mana bidang kemaritiman Nasional di laksanakan oleh TNI AL, Bakamla, POL Air, Kementerian KKP bisa menjadi satu lembaga yang kuat sehingga kemampuan dan fokus kemaritiman yang hendak di capai menjadi Poros Maritim Dunia bukan hanya retorika dan Diksi semata, melainkan menjadi realisasi dan mendapat pengakuan Dunia Internasional karena kemampuan Kemaritiman Indonesia.